

Pacu Penyerapan Anggaran, Polisi Lebih Hati-hati Menindak

SEMARANG—Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Jateng) melonggarkan penindakan terhadap dugaan penyalagunaan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Polisi, tidak akan mengambil tindakan hukum, dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tik-pikor) sebelum ada petunjuk dari Badan Pemeriksa Keua-

ngan (BPK).

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Edhy Moestofa mengatakan pihaknya tidak

mengedepankan tindakan represif dalam dugaan kasus penyalahgunaan anggaran. Ini dilakukan sebagai dukungan agar pemerintah tidak ragu-ragu menyerap anggaran. Selama ini, salah satu alasan yang sering disebut pemerintah saat lambat menyerap anggaran adalah kekhawatiran terjerat kasus korupsi.

“Kalau anggaran tak terse-rap, maka perekonomian melambat. Kami dorong untuk penyerapan anggaran agar optimal. Contoh, proyek pembangunan tol. Kami sudah sampaikan, yang menghambat silakan disampaikan. Nanti kami akan sikat yang menghambat itu. Jadi kami dorong, kalau enggak gitu nanti macet semua,” ungkapnya

di Mapolda Jateng kemarin.

Pemprov Jateng merupakan salah satu provinsi dengan kinerja penyerapan APBD jeblok. Hingga September tahun ini, pemprov baru melaporkan telah menyerap 40% dari anggaran sebesar Rp17 triliun. Demikian juga dengan Pemkot Semarang, hingga kuartal III/2015 berakhir, baru

bisa menggunakan sekitar 42% (Rp1,532 triliun) dari target penggunaan 66% APBD 2015 (Rp3,624 triliun).

Menurut Edhy, langkah yang dilakukan ini juga sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi agar tidak ada penindakan hukum terkait penyerapan anggaran 2015.

KeHal15

(Dari Hal 9

“Nanti akan diaudit BPK, tahunan. Ada waktu juga 60 hari jika ada persoalan. Baru setelah itu, ada petunjuk BPK. Apakah ditindaklanjuti polisi atau kejaksaan (jika ada penyimpangan),” lanjutnya.

Kepala Bidang Humas Polda Jateng, Kombes Pol A. Liliek Darmanto, secara terpisah menyebutkan jika ada pelaporan terkait penyimpangan

anggaran maka akan diarahkan dulu ke BPK.

“Jadi yang bekerja BPK dulu. Kami tidak lidik (penyelidikan) dulu,” kata dia.

Untuk Polda Jawa Tengah sendiri, kata Liliek, penyerapan anggaran (DIPA kepolisian) sudah maksimal untuk tahun ini. “Ini sudah bulan sembilan, penyerapannya sudah 70%. Jadi sudah maksimal,” lanjutnya.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah, Hartadi, mengimbau seluruh satuan kerja untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran. Ini juga sebagai langkah menjaga stabilitas perekonomian.

“Kepada seluruh Kajari di Jawa Tengah, untuk mengawal optimalisasi penyerapan anggaran,” tambahnya.

Pj Wali Kota Semarang Tavip Supriyanto berkali-kali me-

nyatakan akan berusaha memaksimalkan penyerapan anggaran tahun ini. Pihaknya siap meningkatkan kinerja semua jajaran SKPD sehingga realisasi anggaran yang telah ditetapkan bisa semakin meningkat.

Namun, di atas kertas penyerapan anggaran tahun ini berat. Jika Pemkot baru menghabiskan Rp1,532 triliun anggaran, maka tersisa anggaran sebesar Rp2,092 triliun karena

APBD Kota Semarang tahun ini sebesar Rp3,624 triliun. Dengan sisa empat bulan hingga Desember, maka tiap bulan Pemkot harus menghabiskan dana Rp523 miliar. Angka ini sudah terlihat tidak realistis untuk dihabiskan.

“Kita akan terus berupaya agar realisasi penyerapan anggaran bisa lebih meningkat lagi,” tandas Tavip Supriyanto.

● eka setiawan